

ANALISIS KESESUAIAN PEMANFAATAAN RUANG KAWASAN PERMUKIMAN KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

Zefri¹, Setiyono¹

¹ Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik, Universitas Krisnadwipayana

Jl. Raya Jatiwaringin, RT. 03 / RW. 04, Jatiwaringin, Pondok Gede, Jakarta Timur, 13077.

Abstrak

Kecamatan Paciran merupakan salah satu kecamatan yang berpotensi mengalami perkembangan secara fisik maupun non fisik. Perkembangan fisik yang dimaksud, yaitu pertumbuhan daerah terbangunan, sedangkan perkembangan nonfisik yaitu perkembangan sosial-ekonomi (Sukmarini, Mufidah, 2019). Selain itu Industri yang semakin berkembang khususnya industri besar akan semakin banyaknya kebutuhan akan tempat tinggal. Pada Tahun 2015 Kawasan Permukiman terbangun di Kecamatan Paciran tercatat 443,13 Ha, kemudian di tahun 2020 meningkat menjadi 540,15 Ha bertambah 97,01 Ha atau meningkat 17.96 % selama kurun waktu 5 tahun. Oleh sebab itu perlu dilakukan monitoring sebagai bentuk pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan permukiman (Savitri, Muroffa'ah, 2016) di Kecamatan Paciran. Penelitian ini bertujuan untuk : 1. Untuk mengetahui perkembangan pemanfaatan ruang Kawasan Permukiman di Kecamatan Paciran. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kawasan Permukiman di Kecamatan Paciran. 3. Untuk mengetahui ketentuan pemanfaatan ruang wilayah Kawasan Permukiman terhadap implementasi atau kesesuaian tata ruang di Kecamatan Paciran. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis spasial menggunakan Sistem Informasi Geografis (GIS) *superimpose (Overlay)* dengan software Arcgis versi 10.7. Hasil *Overlay* menggunakan GIS antara peta penggunaan lahan kawasan permukiman, peta pola ruang, dan peta administratif (Zefri, 2016) Kecamatan Paciran maka diperoleh peta kesesuaian pemanfaatan ruang. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh perkembangan Kawasan permukiman Kecamatan Paciran dari tahun 2015 Kawasan Permukiman terbangun di Kecamatan Paciran tercatat 443,14 Ha, kemudian di tahun 2020 meningkat menjadi 540,15 Ha bertambah 97,01 Ha atau meningkat 17.96 % selama kurun waktu 5 tahun. Wilayah permukiman terbangun tertinggi di ibukota kecamatan yaitu di desa Paciran sebesar 88.62 Ha dengan pertumbuhan 14.69 Ha atau 14.44 % selama lima tahun terakhir, sedangkan wilayah terbangun terendah di desa waru lor yaitu 3.11 Ha dengan pertumbuhan 0.13 Ha atau 0.13 % selama lima tahun terakhir. Analisis kebencanaan pada Kawasan permukiman di Kecamatan Paciran di dapatkan, Kawasan permukiman tidak rawan bencana 396,00 Ha atau 73.31 %, rawan bencana banjir sedang 65.32 Ha atau 12.29%, rawan banjir tinggi 35.73 Ha atau 6.62%, Rawan bencana gelombang pasang tinggi 12,18 Ha atau 2.25, rawan bencana gelombang tinggi disertai rawan bencana banjir sedang 30.84 Ha atau 5.71%, dan rawan longsor 0.05 Ha atau 0.01%. Dari hasil analisis kebencanaan terdapat tiga desa dengan seluruh wilayah permukiman yang tidak rawan terhadap bencana yaitu di desa Paciran, Sendangduwur dan Sumurgayam. Kesesuaian Kawasan Permukiman terhadap rencana pola ruang wilayah di Kecamatan Paciran teridentifikasi sesuai 537.71 Ha atau 99.54 %, teridentifikasi tidak sesuai di Kawasan hutan mangrove dengan permukiman 0,25 Ha atau 0,04 %, Kawasan Tanaman Pangan dengan permukiman 1,03 Ha atau 0.19 %, Kawasan Transportasi dengan Permukiman 0,82 Ha atau 0.15 % dan gab antara Kawasan Permukiman dengan rencana Pola ruang kosong 0.32 Ha atau 0.06 %. Kesesuaian Kawasan permukiman di Ibukota kecamatan Paciran terhadap draf pola ruang RDTR Kecamatan Paciran di dapatkan Permukiman sesuai dengan peruntukannya seluas 81.397 Ha atau 91.848 %, Permukiman di Zona Lindung Geologi 0.006 Ha atau 0.006 %, Permukiman di Zona Permukiman di Zona RTH kota 0.005 Ha atau 0.005 %, dan Permukiman di Zona Permukiman di Zona RTH kota 0.005 Ha atau 0.005 %, dan Permukiman di Zona Permukiman di Zona RTH kota 0.005 Ha atau 0.005 %.

Permukiman di Zona Sekitar Mata Air 0.766 Ha atau 0.865 % , Permukiman di Zona Sempadan Pantai 5.595 Ha atau 6.313 % , Permukiman di Zona Sempadan Sungai 0.611 Ha atau 0.689 % , Permukiman di Zona RTH Taman Kecamatan 0.108 Ha atau 0.122 % dan Permukiman di Zona RTH Kelurahan 0.050 Ha atau 0.057 % dari total luas Permukiman di Desa Paciran.

Kata kunci: Kawasan Permukiman, Kesesuaian Lahan, Pemanfaatan Ruang

PENDAHULUAN

Menurut UU No.26 tahun 2007 tentang penataan ruang, ruang merupakan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan melangsungkan hidupnya. Keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan (Savitri, Fahrul, 2019). Setiap daerah mempunyai kewajiban menyelenggarakan penataan ruang dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah, potensi sumber daya, ekonomi, sosial dan budaya.

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan berpengaruh pada pola ruang. Pada tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi tingkat pembangunan merupakan salah penyebab perubahan penggunaan lahan yang akan berpengaruh pada pola ruangnya (Amelia, Dwisaraswati, 2019). Ketidak sesuaian penggunaan lahan permukiman terhadap perencanaan akan menghambat daerah untuk menjalankan program-programnya. Selain itu Industri yang semakin berkembang khususnya industri besar akan semakin banyaknya kebutuhan akan tempat tinggal. Oleh sebab itu perlu dilakukan monitoring sebagai bentuk pengendalian pemanfaatan ruang di Kecamatan Paciran.

Monitoring tata ruang Kawasan Permukiman bertujuan untuk melihat bagaimana kesesuaian rencana dengan keadaan yang bertujuan untuk menelaraskan keadaan di lapangan agar

sesuai dengan perencanaan awalnya. Secara detailnya monitoring dilakukan pada tingkat yang lebih kecil dari kabupaten agar diperoleh tingkat akurasi yang tinggi, kecamatan adalah daerah administrasi di bawah wilayah kabupaten.

Perubahan penggunaan lahan harus memperhatikan perencanaan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan. Perencanaan alokasi pemanfaatan ruang disusun dalam RTRW. RTRW ditetapkan dalam ketetapan pemerintah yang berkekuatan hukum dan diatur dalam undang-undang Penata Ruang No. 26 Tahun 2007. ditinjau dari RTRW Kabupaten Lamongan 2011-2031, setiap wilayah memiliki potensi dengan prioritas pengembangan yang berbeda dari berbagai aspek baik pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumberdaya alam, teknologi tinggi, dan daya dukung lingkungan.

Kecamatan Paciran merupakan salah satu kecamatan yang berpotensi mengalami perkembangan secara fisik maupun non fisik. Perkembangan fisik yang dimaksud, yaitu pertumbuhan daerah terbangunan, sedangkan perkembangan nonfisik yaitu perkembangan sosial-ekonomi. Kecamatan Paciran adalah sebagai kecamatan pusat pelayanan kawasan yaitu kawasan perkotaan yang melayani kecamatan yang bersangkutan serta beberapa kecamatan sekitarnya, seperti pusat pelayanan pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, industri serta pertanian.

Kecamatan Paciran merupakan salah satu dari 27 kecamatan di kabupaten Lamongan dengan daerah terbangun paling tinggi dengan luas daerah terbangun seluas 966.21 Ha atau 6.52 %

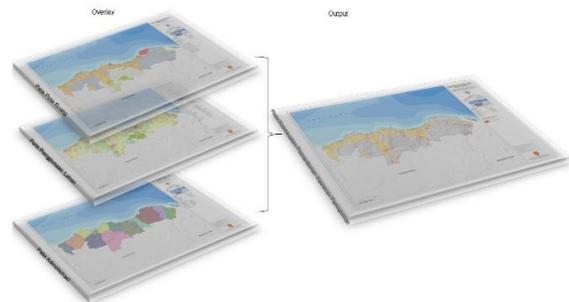
dari total wilayah terbagun di Kabupaten Lamongan. Semakin maraknya isu perubahan fungsi lahan di beberapa daerah dikhawatirkan akan berdampak pada tingkat produktifitas di berbagai sektor. Langkah pencegahan harus dilakukan setelah melihat indikasi adanya perubahan fungsi lahan agar sesuai dengan perencanaannya. Langkah pencegahan tidak hanya dilakukan dari skala besar saja namun juga harus memperhatikan unit terkecilnya yaitu bidang tanah. Di unit terkecilnya pencegahan salah satunya dapat dilakukan dengan tidak memberikan izin untuk perubahan fungsi lahan apabila perubahan fungsi tersebut sesuai dengan rencana tata ruang/wilayah pada area tersebut.

Pada Tahun 2015 Kawasan Permukiman terbangun di Kecamatan Paciran tercatat 443,13 Ha, kemudian di tahun 2020 meningkat menjadi 540,15 Ha bertambah 97,01 Ha atau meningkat 17,96 % selama kurun waktu 5 tahun. Dari permasalahan tersebut peneliti ingin melihat bagaimana penggunaan dan pemanfaatan lahan kawasan permukiman di kecamatan Paciran dan melihat bagaimana kesesuaian antara penggunaan lahan permukiman terhadap rencana ruangnya yang bisa menjadi bahan untuk pemerintah kecamatan Paciran khususnya maupun pemerintah Kabupaten Lamongan umumnya dalam membuat kebijakan terkait dengan penataan ruang dan perizinan dari pemanfaatan ruangnya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis spasial GIS dengan software Arcgis versi 10.7 dengan teknik Superimpose (Overlay). Data sekunder yang digunakan antara lain yaitu peta rencana pola ruang RTRW dan peta penggunaan lahan terbaru Kecamatan

Paciran yang akan menghasilkan klasifikasi kesesuaian pemanfaatan ruang Kawasan Permukiman yaitu sesuai dan tidak sesuai dengan peruntukannya.

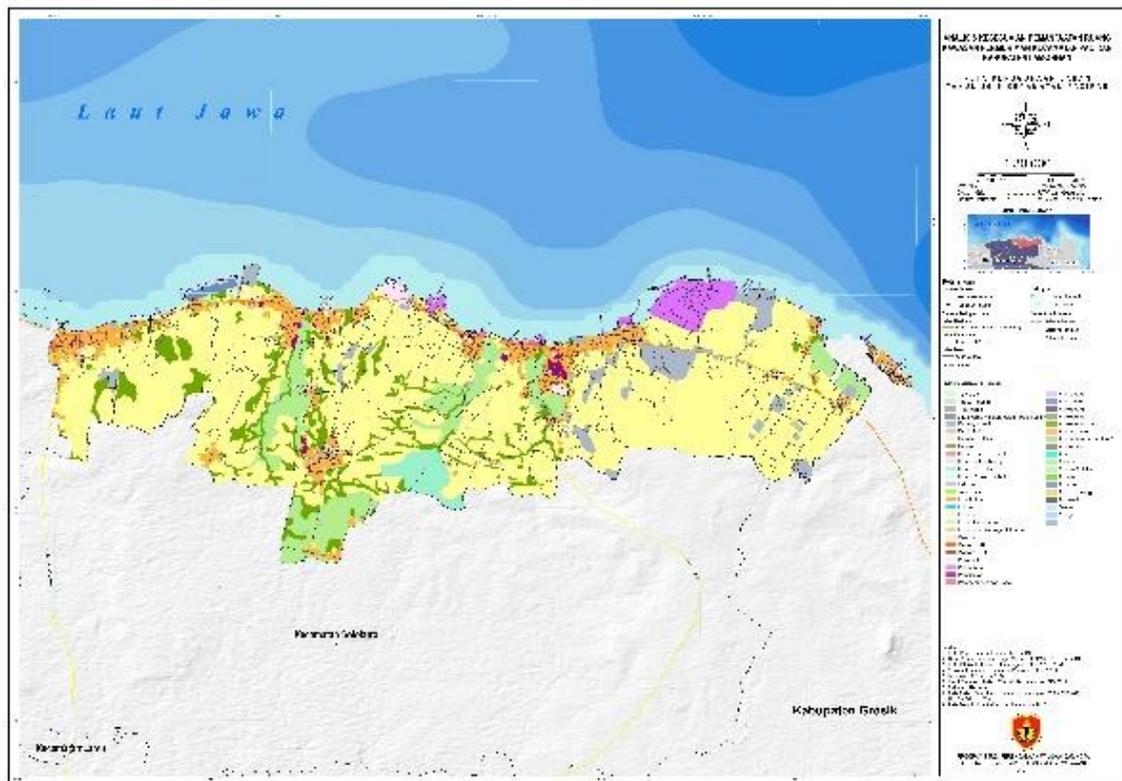


Gambar 1 Ilustrasi Teknik Overlay

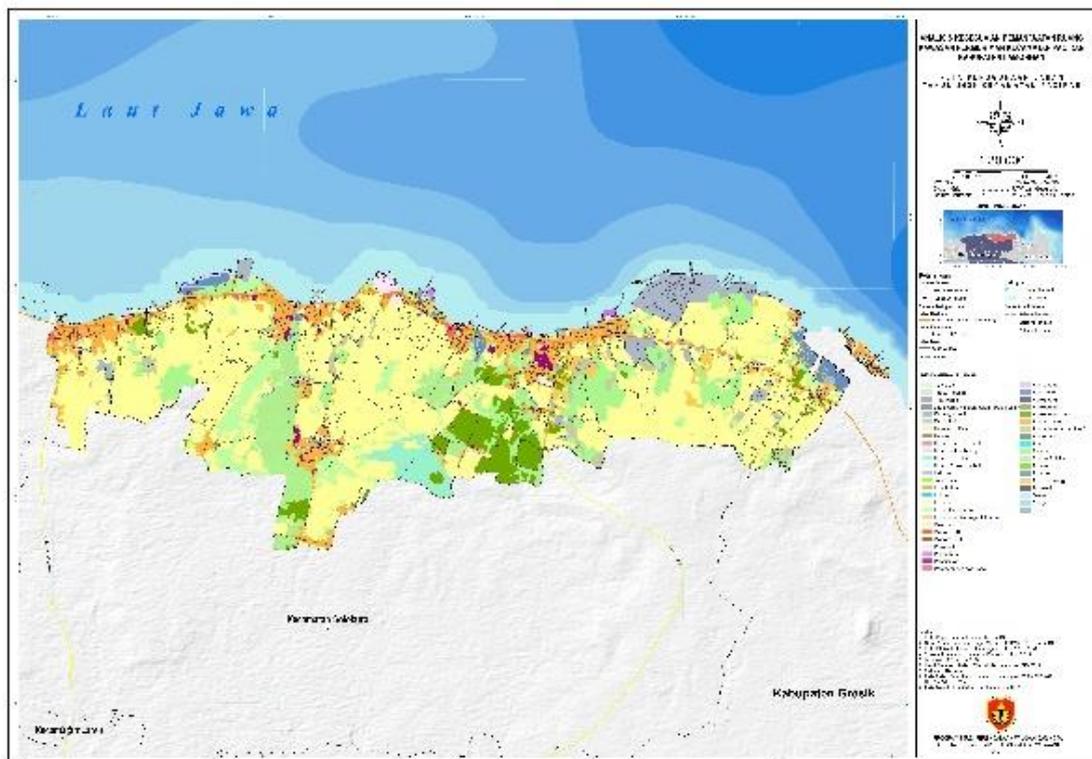
HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perkembangan Kawasan Permukiman

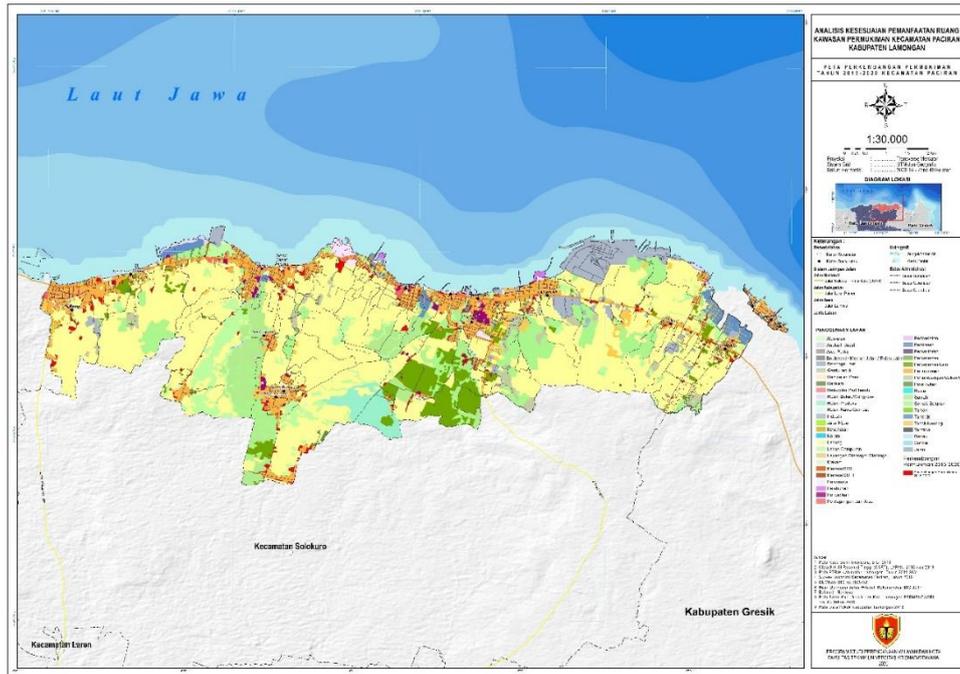
Pada analisis ini guna mengetahui perkembangan permukiman berdasarkan hasil pemetaan menggunakan Arcgis dengan sistem analisis *Overlay* yang menggabungkan data penggunaan lahan Kawasan permukiman tahun 2015 dengan data penggunaan lahan kawasan permukiman tahun 2020. Hasil dari penelitian ini diperoleh perkembangan kawasan permukiman Kecamatan Paciran dari tahun 2015 kawasan permukiman terbangun di Kecamatan Paciran tercatat 443,14 Ha, kemudian di tahun 2020 meningkat menjadi 540,15 Ha bertambah 97,01 Ha atau meningkat 17,96% selama kurun waktu 5 tahun. Wilayah permukiman terbagun tertinggi di ibukota kecamatan yaitu di desa Paciran sebesar 88.62 Ha dengan pertumbuhan 14.69 Ha atau 14.44% selama lima tahun terakhir, sedangkan wilayah terbangun terendah di Desa Waru Lor yaitu 3.11 Ha dengan pertumbuhan 0.13 Ha atau 0.13% selama lima tahun terakhir. Untuk perkembangan permukiman tiap-tiap desa di Kecamatan Paciran disajikan pada gambar dan tabel berikut.



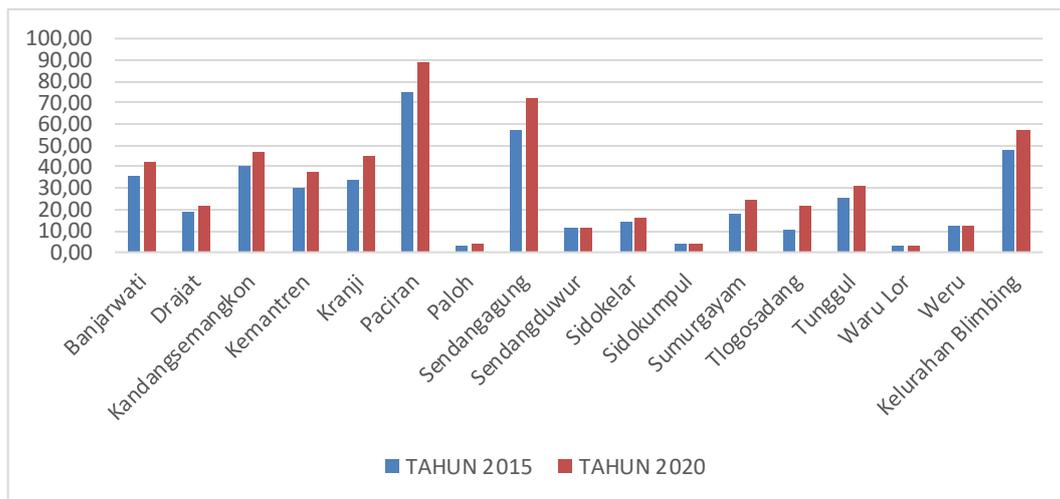
Gambar 1 Penggunaan Lahan Tahun 2015



Gambar 2 Peta Penggunaan Lahan Tahun 2020



Gambar 3 Peta Perkembangan Lahan Tahun 2015 – 2020



Gambar 4 Diagram Perkembangan Permukiman Kecamatan Paciran Tahun 2015 - 2020

Tabel 1 Perkembangan Permukiman Kecamatan Paciran Tahun 2015 – 2020

No	Desa	Tahun 2015	Tahun 2020	Pertumbuhan (Ha)	Presentase (%)
1	Banjarwati	35,99	42,54	6,55	6,75
2	Drajat	19,40	21,51	2,10	2,17
3	Kandangsemangkon	40,66	46,82	6,16	6,35
4	Kemantren	30,46	37,81	7,35	7,58
5	Kranji	34,14	45,23	11,10	11,44
6	Paciran	74,62	88,62	14,01	14,44
7	Paloh	3,42	3,87	0,45	0,46
8	Sendangagung	57,16	71,85	14,69	15,14
9	Sendangduwur	11,32	11,51	0,20	0,20

10	Sidokelar	14,16	16,17	2,02	2,08
11	Sidokumpul	4,37	4,46	0,09	0,10
12	Sumurgayam	18,44	24,20	5,75	5,93
13	Tlogosadang	10,28	21,69	11,41	11,76
14	Tunggul	25,32	31,31	5,98	6,17
15	Waru Lor	2,98	3,11	0,13	0,13
16	Weru	12,16	12,52	0,36	0,37
17	Kelurahan Blimbing	48,26	56,92	8,66	8,92
JUMLAH				97,01	100,00

Sumber : Hasil Analisis 2020

Analisis Rawan Bencana Kawasan Permukiman

Bencana yang berpotensi terjadi di Kecamatan Paciran berdasarkan kajian

Resiko Bencana (KRS) Tahun 2016-2020 adalah banjir, kekeringan, cuaca ekstim, tanah longsor, gelombang ekstim dan abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan.

Tabel 2 Potensi Bencana Alam Kecamatan Paciran

No	Potensi Bencana	Luas (Ha)	Luas (%)	Kategori
1	Banjir	1.231	21,67	Sedang
2	Kekeringan	5.631	99,11	Sedang
3	Cuaca Ekstim	5.521	97,18	Tinggi
4	Tanah Longsor	271	4,77	Tinggi
5	Gelombang Ekstim & Abrasi	381	6,71	Sedang
6	Kebakaran Hutan & Lahan	75	1,32	Tinggi
Luas Total Paciran		5.681,32		

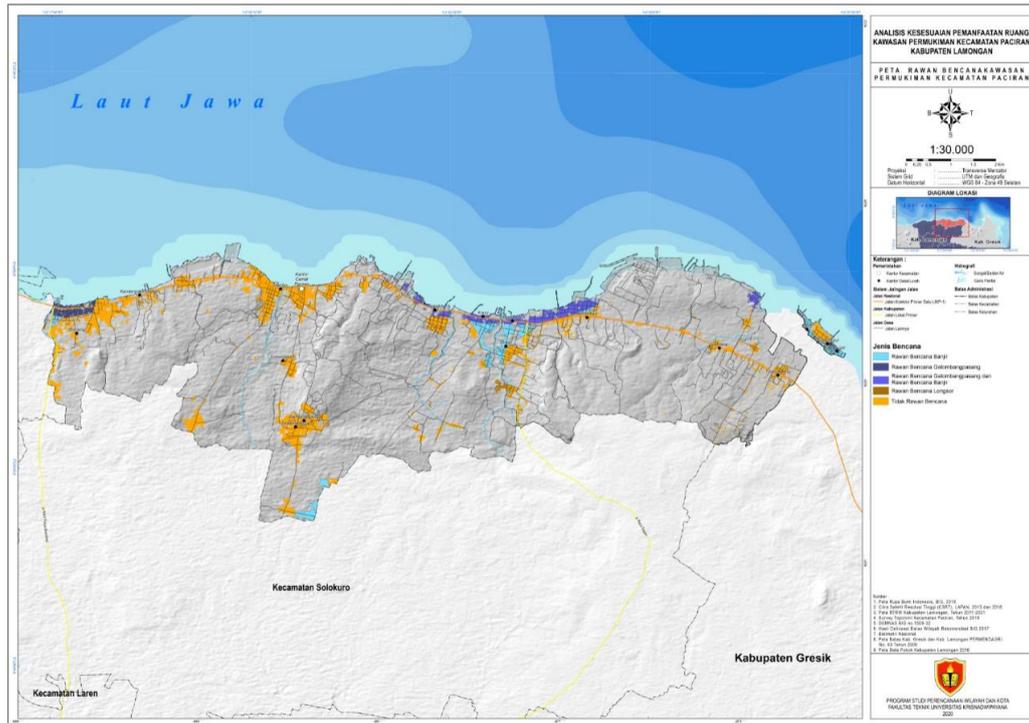
Sumber : *Inarisk*, BNPB



Gambar 5 Kategori Kebencanaan Kecamatan Paciran

Hasil analisis Kawasan permukiman rawan bencana di Kecamatan Paciran di dapatkan, rawan bencana banjir sedang 65.32 Ha atau 12.29%, rawan banjir tinggi 35.73 Ha atau 6.62%, Rawan bencana gelombang pasang tinggi 12,18 Ha atau 2.25, rawan bencana gelombang tinggi dan

juuga rawan bencana banjir sedang 30.84 Ha atau 5.71%, rawan longsor 0.05 Ha atau 0.01%, dan Kawasan permukiman tidak rawan bencana 396,00 Ha atau 73.31 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

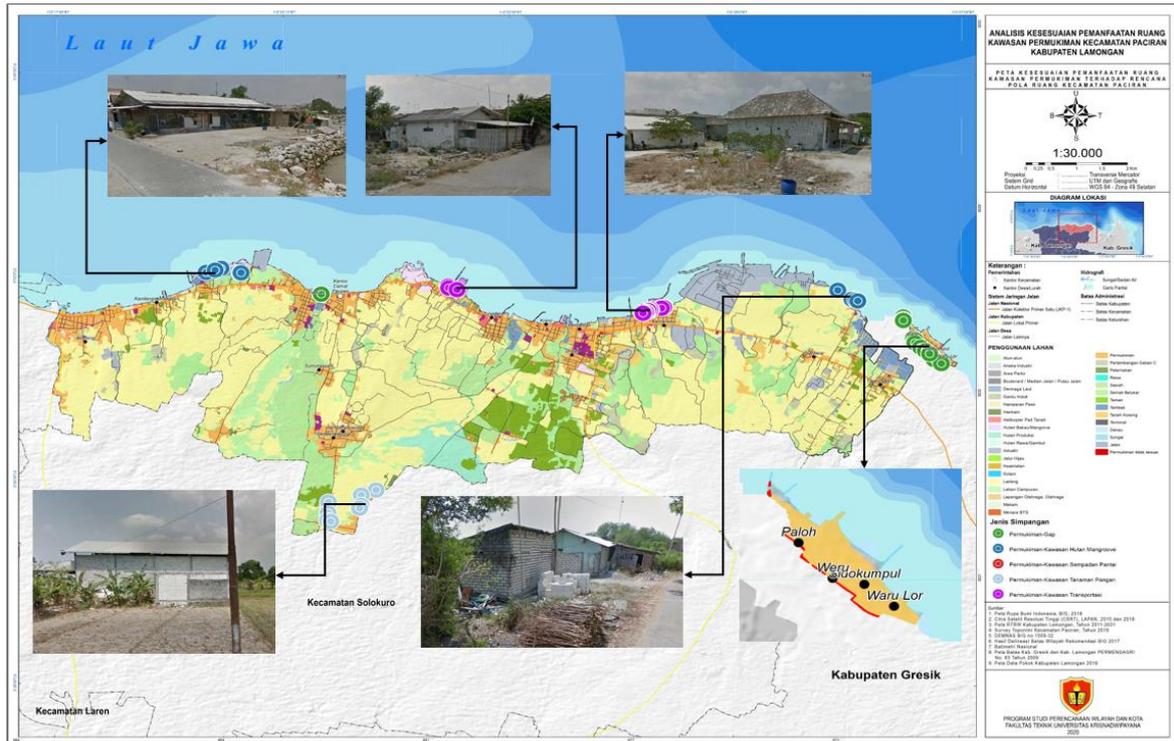


Gambar 6 Peta Rawan Bencana Kawasan Permukiman

Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kawasan Permukiman terhadap Polaruang Wilayah di Kecamatan Paciran

Untuk mengetahui tingkat kesesuaian lahan Kawasan permukiman di Kecamatan Paciran berdasarkan RTRW rencana pola ruang dengan analisis teknik overlay menggunakan data Penggunaan lahan tahun 2020, peta pola ruang dan peta administrasi untuk mengetahui kesesuaian pada tiap-tiap desa. Analisis simpangan antara pola ruang Kawasan Permukiman RTRW dengan kondisi eksisting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pola ruang yang telah direncanakan terealisasi, dan seberapa “gap” antara pola ruang Kawasan permukiman dan kondisi eksisting. Berikut adalah hasil analisis simpangan polaruang Kawasan permukiman RTRW dan kondidisi eksisting di kecamatan Paciran.

Analisis kesesuaian terhadap rencana pola ruang wilayah di Kecamatan Paciran teridentifikasi tidak sesuai di 6 desa yaitu di Desa Kandang semangkon Permukiman-Hutan mangrove 204,95 m², di Desa Kemantren Permukiman-Kawasan Transportasi 7167,55 m², di Desa Paciran Permukiman-Hutan Mangrove 1315,92 m², Permukiman-sempadan Pantai 26,33 m², di Desa Sendangagung Permukiman-Kawasan Tanaman Pangan 10365,27 m², di Desa Sidokelar Permukiman-Kawasan Hutan Mangroove 977,86 m², di Desa Sidokumpul gap Permukiman-Pola ruang 943,35 m², dan di Desa Tunggul Permukiman-Kawasan Transportasi 1077,82 m². Selain itu, terdapat tiga desa gab antara rencana pola ruang kosong dengan Kawasan permukiman yaitu Desa Paciran 14,26 m², Desa Paloh 1183,57 m² dan Desa Weru 1123,82 m².

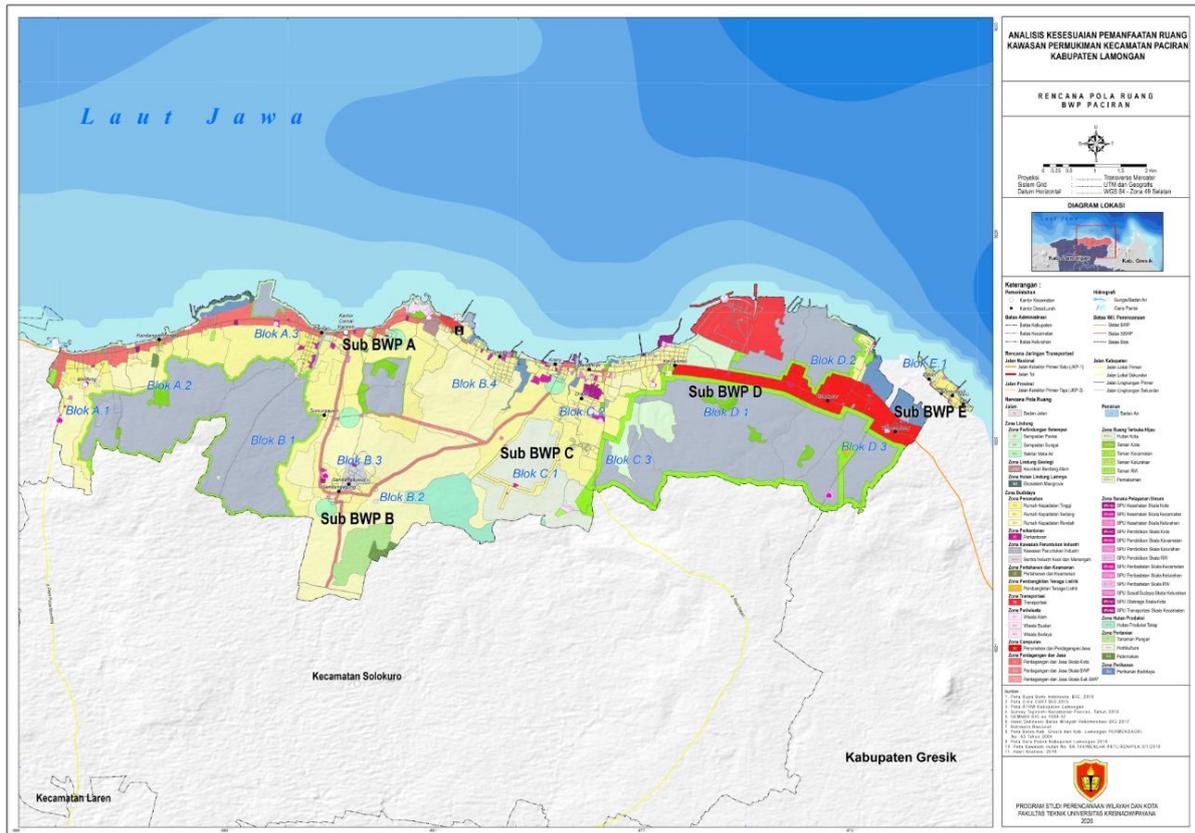


Gambar 7 Peta Kesesuaian Kawasan Permukiman Kecamatan Paciran Terhadap RTRW Kabupaten Lamongan

Analisis Kesesuaian Kawasan permukiman di Desa Paciran terhadap draf Pola Ruang RDTR Kecamatan Paciran

Untuk mengetahui tingkat kesesuaian lahan Kawasan permukiman di Ibukota Kecamatan Paciran yaitu di Desa

Paciran dilakukan Teknik overlay dengan data Draf Pola Ruang RDTR yang telah disusun tahun 2019 kemudian overlaykan dengan data Penggunaan lahan tahun 2020 untuk mengetahui kesesuaian atau simpangan yang terjadi pada Kawasan permukiman Desa Paciran.



Gambar 8 Peta Pola Ruang RDTR Kecamatan Paciran

Hasil Analisis kesesuaian Kawasan permukiman di Desa Paciran terhadap

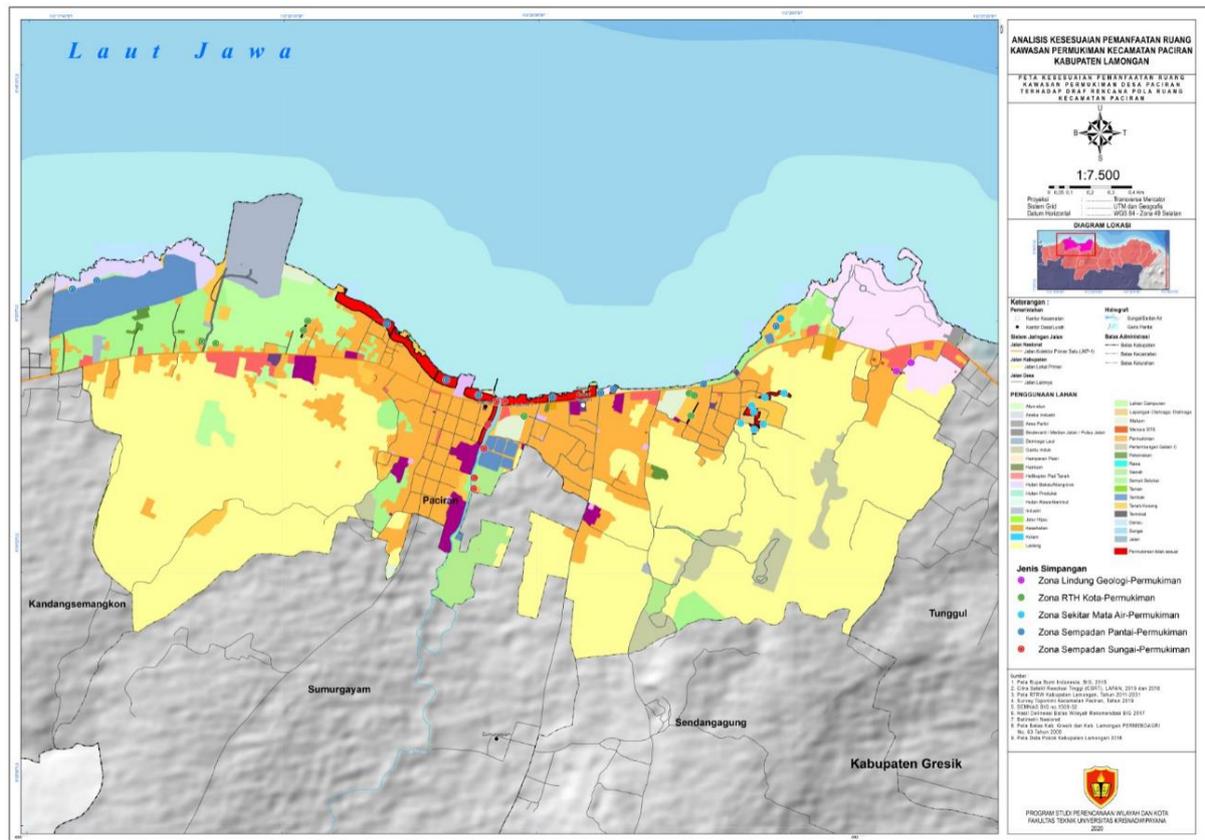
Pola Ruang RDTR Kecamatan Paciran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kawasan Permukiman di Desa Paciran Terhadap RDTR Kecamatan Paciran

Desa	Eksisting	Nama Objek	Nama Zona	Sub Zona	ITBX	Keterangan	Luas Ha	Presentase (%)
Paciran	Permukiman	Kawasan Peruntukan Industri	Zona KPI	Kawasan Peruntukan Industri	B	Sesuai	0,084	0,095
		Keunikan Bentang Alam	Zona Lindung Geologi	Keunikan Bentang Alam	X	Tidak Sesuai	0,006	0,006
		Pemukaman	Zona RTH Kota	RTH	X	Tidak Sesuai	0,005	0,005
		Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	I	Sesuai	2,634	2,972
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	I	Sesuai	32,364	36,520
		Perkantoran	Zona Perkantoran	Perkantoran	I	Sesuai	0,003	0,003
		Pertahanan dan Keamanan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	B	Sesuai	0,043	0,049

		Peternakan	Zona Pertanian	Peternakan	T	Sesuai	0,214	0,242
		Rumah Kepadatan Sedang	Zona Perumahan	Rumah Kepadatan Sedang	I	Sesuai	31,352	35,378
		Rumah Kepadatan Tinggi	Zona Perumahan	Rumah Kepadatan Tinggi	I	Sesuai	13,163	14,853
		Sekitar Mata Air	Zona Sekitar Mata Air	Sekitar Mata Air	X	Tidak Sesuai	0,766	0,865
		Sempadan Pantai	Zona Sempadan Pantai	Zona Sempadan Pantai	X	Tidak Sesuai	5,595	6,313
		Sempadan Sungai	Zona Sempadan Sungai	Sempadan Sungai	X	Tidak Sesuai	0,611	0,689
		SPU Kesehatan Skala Kelurahan	Zona SPU	SPU Kesehatan Skala Kelurahan	B	Sesuai	0,003	0,003
Paciran	Permukiman	SPU Olahraga Skala Kota	Zona SPU	SPU Kesehatan Skala Kota	B	Sesuai	0,045	0,051
		SPU Pendidikan Skala Kecamatan	Zona SPU	SPU Pendidikan Skala Kecamatan	B	Sesuai	0,304	0,343
		SPU Pendidikan Skala Kelurahan	Zona SPU	SPU Pendidikan Skala Kelurahan	B	Sesuai	0,253	0,286
		SPU Pendidikan Skala Kota	Zona SPU	SPU Pendidikan Skala Kota	B	Sesuai	0,622	0,702
		SPU Pendidikan Skala RW	Zona SPU	SPU Pendidikan Skala RW	B	Sesuai	0,150	0,170
		SPU Peribadatan Skala Kecamatan	Zona SPU	SPU Peribadatan Skala Kecamatan	B	Sesuai	0,003	0,004
		SPU Peribadatan Skala Kelurahan	Zona SPU	SPU Peribadatan Skala Kelurahan	B	Sesuai	0,142	0,160
		SPU Peribadatan Skala RW	Zona SPU	SPU Peribadatan Skala RW	B	Sesuai	0,102	0,115
		Taman Kecamatan	Zona RTH Kota	Taman Kecamatan	X	Tidak Sesuai	0,108	0,122
		Taman Kelurahan	Zona RTH Kota	Taman Kelurahan	X	Tidak Sesuai	0,050	0,057
		Jumlah					88,621	100,000

Sumber : Hasil Analisis 2020



Gambar 9 Peta Kesesuaian Kawasan Permukiman di Desa Paciran Terhadap Pola Ruang RDTR Kecamatan Paciran

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Paciran memiliki hasil perkembangan kawasan permukiman tahun 2015-2020 Kecamatan Paciran dari tahun 2015 Kawasan Permukiman terbangun di Kecamatan Paciran tercatat 443,14 Ha, kemudian di tahun 2020 meningkat menjadi 540,15 Ha bertambah 97,01 Ha atau meningkat 17.96 % selama kurun waktu 5 tahun. Wilayah permukiman terbangun tertinggi di ibukota Kecamatan yaitu di desa Paciran sebesar 88.62 Ha dengan pertumbuhan 14.69 Ha atau 14.44 % selama lima tahun terakhir, sedangkan wilayah terbangun terendah di desa waru lor yaitu 3.11 Ha dengan pertumbuhan 0.13 Ha atau 0.13 % selama lima tahun terakhir.

Kawasan permukiman Kecamatan Paciran rawan terhadap banjir sedang 65.32 Ha atau 12.29%, rawan banjir tinggi 35.73 Ha atau 6.62%, Rawan bencana

gelombang pasang tinggi 12,18 Ha atau 2.25, rawan bencana gelombang tinggi disertai rawan bencana banjir sedang 30.84 Ha atau 5.71%, rawan longsor 0.05 Ha atau 0.01%, dan Kawasan permukiman tidak rawan bencana 396,00 Ha atau 73.31 %. Terdapat tiga desa dengan seluruh wilayah permukiman yang tidak rawan terhadap bencana yaitu di desa Paciran, Sendangduwur dan Sumurgayam.

Kesesuaian Kawasan Permukiman terhadap rencana pola ruang wilayah di Kecamatan Paciran teridentifikasi sesuai 537.71 Ha atau 99.54 %, teridentifikasi tidak sesuai di Kawasan hutan mangrove dengan permukiman 0,25 Ha atau 0,04 %, Kawasan Tanaman Pangan dengan permukiman 1,03 Ha atau 0.19 %, Kawasan Transportasi dengan Permukiman 0,82 Ha atau 0.15 % dan gab antara Kawasan Permukiman dengan rencana Pola ruang kosong 0.32 Ha atau 0.06 %. Kesesuaian Kawasan permukiman di Ibukota kecamatan Paciran terhadap draf pola

ruang RDTR Kecamatan Paciran di dapatkan Permukiman sesuai dengan peruntukannya seluas 81.397 Ha atau 91.848 %, Permukiman di Zona Lindung Geologi 0.006 Ha atau 0.006 %, Permukiman di Zona Permukiman di Zona RTH kota 0.005 Ha atau 0.005 %, Permukiman di Zona Sekitar Mata Air 0.766 Ha atau 0.865 % , Permukiman di Zona Sempadan Pantai 5.595 Ha atau 6.313 %, Permukiman di Zona Sempadan Sungai 0.611 atau 0.689 %, Permukiman di Zona RTH Taman Kecamatan 0.108 Ha atau 0.122 % dan Permukiman di Zona RTH Kelurahan 0.050 Ha atau 0.057 % dari total luas Permukiman di Desa Paciran.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka penulis memberikan rekomendasi setiap rencana pembangunan harus berdasarkan rencana tata ruang wilayah maupun berbagai bentuk perencanaan pemanfaatan ruang yang berlaku, perlu adanya penguatan kualitas daya tarik bagi lokasi yang belum di kembangkan atau di manfaatkan secara maksimal. Penguatan daya tarik dilakukan pada kawasan yang belum dimanfaatkan sesuai dengan rencana tata ruangnya, dan perlu tindakan yang tegas dan disiplin terhadap penyimpangan yang terjadi seperti pemberian ijin mendirikan bangunan dengan mempertimbangan rencana ruang yang telah di tetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel dalam Jurnal (Jurnal Primer)

- Alauddin Makasar, *Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota*.
- Ade Wahyudi, (2019). *Evaluasi Kesesuaian Lahan Arahkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kecamatan Mandau*, Universitas Diponegoro Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.
- Amelia, Dwisaraswati, (2019). *Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Pada*

Sempadan Sungai Sario Di Kota Manado.
Jurnal Ilmiah Plano Krisna.

- Fidel R tumanken, Frankli n J.C Papia dan Ingerid L Moniaga. (2018). *Analisis Peruntukan Lahan Permukiman Berdasarkan Kesesuaian di Kecamatan Airmadidi*, Universitas Sam Ratulangi Manado Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.
- Adri Panjaitan, Bambang Sudarsono. (2019) *Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cianjur Menggunakan Sistem Informasi Geografis*, Geodesi Universitas Diponegoro Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.
- Hilmi, Hilmansyah, Irwan Rudianto. (2015). *Kajian Perkembangan dan Kesesuaian Lahan Permukiman Eksisting di Kecamatan Indramayu*. Universitas Diponegoro Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.
- Rusman.S. (2018). *Studi Kawasan Permukiman Berbasis GIS Kecamatan Pangkajene dan Kepulauan*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.
- Savitri, Muroffa'ah, (2016). *Analisis Terhadap Kesesuaian Pemanfaatan Pola Ruang Melalui Sistem Informasi Geografi Di Kota Depok*. Jurnal Ilmiah Plano Krisna.
- Savitri, Fahrul, (2019). *Audit Pemanfaatan Ruang Di Perumahan Pesona Kalisari*. Jurnal Ilmiah Plano Krisna.
- Sukmarini, Mufidah, (2019). *Strategi Pengendalian Pemanfaatan Lahan Sekitar Kawasan Kalimantan Kota Bekasi Secara Berkelanjutan*. Jurnal Ilmiah Plano Krisna.

Widjinarko Nur. (2015). *Evaluasi Pemanfaatan Ruang Tahun 2013 -2014 Terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Jogonalan Tahun 2013- 2018.* Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas Geografi.

Zefri, (2016). *Pemetaan Dan Sistem Informasi Geografis (Sig).* Jurnal Ilmiah Plano Krisna.

Peraturan/Undang- Undang

Undang-undang tahun Nomor 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang.*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang *Perumahan dan Kawasan Permukiman.*

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2009 tentang *Pedoman Tentang Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah.*

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang *Penanggulangan Bencana.*

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang *Informasi Geospasial.*

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang *Ketelitian Peta untuk RTRW.*